

IMPLEMENTASI PENGGUNAAN APLIKASI ELSIMIL (ELEKTRONIK SIAP NIKAH SIAP HAMIL) DI KECAMATAN BABIRIK KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

Samia¹, Jumaidi², Fakhri³

Program Studi Administrasi Publik
Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai

E-mail: samiamia249@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi penggunaan Aplikasi Elsimil (Elektronik Siap Nikah Siap Hamil) di Kecamatan Babirik, Kabupaten Hulu Sungai Utara. Aplikasi Elsimil merupakan inovasi pelayanan publik berbasis digital yang dikembangkan sebagai upaya pencegahan stunting melalui pendampingan pranikah dan prahamil. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai pelaksanaan Aplikasi Elsimil di tingkat kecamatan. Informan penelitian dipilih secara purposive yang terdiri dari sejumlah informan, meliputi petugas kesehatan, aparat pemerintah tingkat kecamatan, kader pendamping, serta masyarakat sebagai pengguna Aplikasi Elsimil. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi lapangan, wawancara mendalam, dan dokumentasi, sedangkan analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Analisis implementasi difokuskan pada kejelasan tujuan kebijakan, ketersediaan sumber daya, komunikasi antar pelaksana, karakteristik organisasi pelaksana, kondisi sosial masyarakat, serta sikap pelaksana kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi penggunaan Aplikasi Elsimil di Kecamatan Babirik telah dilaksanakan, namun belum berjalan secara optimal. Hal ini ditunjukkan oleh rendahnya sosialisasi yang dilakukan oleh Tim Pendamping Keluarga (TPK), Fasilitas Sarana Prasarana Pendukung yang belum memadai, serta masih kurangnya pelatihan pada Tim Pendamping Keluarga (TPK) dalam penggunaan Aplikasi Elsimil (Elektronik Siap Nikah Siap Hamil) yang mengalami perubahan versi. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sosialisasi, peningkatan sarana prasarana, serta optimalisasi pelatihan Tim Pendamping Keluarga (TPK) agar implementasi Aplikasi Elsimil dapat berjalan dengan baik.

Kata kunci: implementasi kebijakan, aplikasi Elsimil, pencegahan stunting

ABSTRACT

This study examines the implementation of the Elsimil Application (Electronic Ready for Marriage and Pregnancy) in Babirik District, Hulu Sungai Utara Regency. The Elsimil application is a digital public service innovation developed to support stunting prevention through premarital and pre-pregnancy assistance. This research employed a qualitative descriptive approach to gain a comprehensive understanding of how the application is implemented at the district level. Research informants were selected purposively and consisted of several categories, including health workers, sub-district government officials, family assistance cadres, and community members as users of the Elsimil Application. Data were collected through field observations, in-depth interviews, and documentation, and analyzed using data reduction, data presentation, and conclusion-drawing techniques. The analysis of implementation focused on the clarity of policy objectives, availability of resources, communication among implementing actors, organizational characteristics, social conditions of the community, and the attitudes of policy implementers. The findings indicate that the implementation of the Elsimil Application in Babirik District has been carried out; however, it has not yet been fully effective. This is reflected in the limited dissemination conducted by the Family Assistance Team (TPK), inadequate supporting facilities and infrastructure, and insufficient training provided to the Family Assistance Team (TPK), particularly in adapting to changes in the application version. Therefore, strengthening dissemination efforts, improving supporting facilities and infrastructure, and optimizing training for the Family Assistance Team (TPK) are necessary to ensure the effective implementation of the Elsimil Application.

Keywords: policy implementation, Elsimil application, stunting prevention

PENDAHULUAN

Stunting merupakan kondisi pertumbuhan yang terhambat pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis, infeksi berulang, dan kurangnya stimulasi psikososial. Masalah ini masih menjadi isu serius di Indonesia karena tidak hanya mempengaruhi pertumbuhan fisik anak, tetapi juga perkembangan kognitif dan kualitas sumber daya manusia di masa depan. Pencegahan stunting memerlukan pendekatan yang menyeluruh, termasuk intervensi sejak masa prakonsepsi dan kehamilan, karena sebagian kerusakan pertumbuhan sudah terjadi sebelum anak lahir. Faktor-faktor seperti status gizi calon ibu, anemia, perawatan kesehatan selama kehamilan, serta kondisi lingkungan dan kesehatan secara umum menjadi kunci dalam menurunkan risiko stunting, sehingga strategi preventif pada periode pranikah dan prakehamilan menjadi sangat penting.

Teknologi kesehatan mencakup seluruh alat dan metode yang digunakan untuk mendukung diagnosis, pencegahan, dan penanganan masalah kesehatan manusia. Dalam konteks ini, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menyediakan akses informasi, edukasi, dan fasilitas layanan kesehatan guna meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Sebagai bagian dari upaya percepatan penurunan angka stunting, pemerintah melalui BKKBN mengembangkan Aplikasi Elektronik Siap Nikah Siap Hamil (Elsimil), yang ditujukan bagi calon pengantin, ibu hamil, balita, dan ibu pasca nifas. Aplikasi ini berfungsi sebagai media edukasi dan pendampingan kesehatan pranikah, sekaligus menyediakan skrining kesehatan awal bagi calon pengantin tiga bulan sebelum menikah.

Elsimil telah berkembang dari versi awal hingga versi terbaru 3.0, yang dirancang agar lebih responsif terhadap kebutuhan pengguna, mempermudah proses skrining, dan memberikan edukasi kesehatan secara lebih efektif. Implementasi aplikasi dilakukan secara bertahap melalui sosialisasi dan pelatihan bagi Tim Pendamping Keluarga (TPK), termasuk kader penyuluh keluarga berencana dan bidan desa. Namun, meskipun telah berjalan sejak 2022 di Kecamatan Babirik, sejumlah kendala masih muncul, seperti rendahnya pemahaman masyarakat, kesadaran calon pengantin yang terbatas, keterbatasan jaringan internet di beberapa desa, dan minimnya pelatihan bagi TPK terkait penggunaan versi terbaru.

Prevalensi stunting di Kabupaten Hulu Sungai Utara masih cukup tinggi. Kecamatan Babirik, yang terdiri dari 23 desa, termasuk wilayah dengan angka stunting tertinggi, dengan beberapa desa sebagai locus prioritas. Balai Penyuluhan Keluarga Berencana berperan sebagai pusat kegiatan KKBPK, mulai dari perencanaan hingga pembinaan petugas dan pengguna. Jumlah pasangan calon pengantin yang terdaftar di Elsimil meningkat setiap tahun, namun aplikasi masih belum sepenuhnya dimanfaatkan sebagai sarana edukasi dan skrining kesehatan. Fenomena utama yang muncul di lapangan adalah keterbatasan sosialisasi oleh TPK, kurangnya sarana dan prasarana pendukung, serta minimnya pelatihan terkait penggunaan aplikasi versi terbaru. Kondisi ini menjadi dasar penelitian dengan judul “Implementasi Penggunaan Aplikasi Elsimil (Elektronik Siap Nikah Siap Hamil) di Kecamatan Babirik, Kabupaten Hulu Sungai Utara,” yang bertujuan menilai efektivitas aplikasi dalam mencegah stunting dan meningkatkan kesehatan keluarga.

Penelitian yang dilakukan oleh Dellarozza Al Sendya Putri (2023) Implementasi Aplikasi Elektronik Siap Nikah Siap Hamil (ELSIMIL) oleh BKKBN dalam Rangka Penurunan Stunting di Kota Yogyakarta. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan aplikasi Elsimil serta mengidentifikasi strategi yang dapat meningkatkan efektivitas penggunaannya dalam menekan prevalensi stunting. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian dianalisis melalui tahapan reduksi data, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Kajian ini mempertimbangkan tiga aspek utama, yakni sumber daya yang tersedia, karakteristik agen pelaksana, dan kondisi lingkungan di sekitar

implementasi program. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aplikasi Elsimil berjalan cukup baik, yang tercermin dari penurunan angka stunting dari 17,1% pada tahun 2021 menjadi 13,8% pada tahun 2022. Berbagai upaya dilakukan untuk mendukung keberhasilan ini, antara lain melalui pendekatan akademis, penyebaran informasi edukatif melalui media sosial, serta kerja sama dengan influencer untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan pranikah dan pencegahan stunting.

Penelitian Nuramalia Sinta pada tahun (2022) Implementasi Kebijakan Pencegahan Stunting oleh Desa Saguling Kecamatan Baregbeg Kabupaten Ciamis. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis dengan pendekatan kualitatif, di mana data dikumpulkan melalui studi kepustakaan, observasi lapangan, wawancara, dan dokumentasi, kemudian dianalisis untuk menarik kesimpulan yang dapat menjawab permasalahan penelitian. Penelitian ini melibatkan sebelas informan yang memberikan perspektif mengenai implementasi kebijakan pencegahan stunting di tingkat desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan tersebut belum berjalan secara optimal sesuai dengan empat variabel kunci yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan. Beberapa kendala utama yang ditemukan adalah kurangnya perhatian pemerintah desa dalam memberikan dukungan anggaran dan kebijakan yang jelas bagi petugas pelaksana, sehingga petugas mengalami kesulitan dalam menyelenggarakan penyuluhan kepada masyarakat. Selain itu, observasi lapangan mengungkapkan bahwa program pencegahan stunting di desa masih belum terstruktur dengan baik, dukungan anggaran kepada masyarakat terbatas, dan kegiatan penyuluhan oleh kader jarang dilakukan, sehingga informasi terkait pencegahan stunting tidak tersampaikan secara maksimal kepada masyarakat.

Mnurut Thomas R. Dye dalam Sahaya Anggara (2014), kebijakan publik mencakup semua keputusan atau tindakan yang diambil pemerintah, baik dalam bentuk melakukan sesuatu maupun memilih untuk tidak melakukan sesuatu. Artinya, setiap keputusan pemerintah apakah itu tindakan nyata atau ketidak-tindakan secara sengaja dirancang untuk mencapai tujuan tertentu. Kebijakan publik tidak hanya mencerminkan apa yang pemerintah lakukan, tetapi juga menegaskan apa yang sengaja tidak dilakukan, sehingga kedua pilihan tersebut tetap memiliki dampak dan maksud strategis dalam upaya mengatur, memandu, atau mempengaruhi masyarakat sesuai dengan tujuan dari pemerintah.

Menurut Deddy Mulyadi (2016), implementasi kebijakan pada dasarnya merupakan suatu proses perubahan atau transformasi yang melibatkan banyak organisasi secara simultan, di mana setiap langkah yang diambil melalui strategi pelaksanaan kebijakan akan berdampak pada berbagai lapisan masyarakat. Proses ini bukan sekadar mengeksekusi kebijakan secara mekanis, melainkan juga menuntut kemampuan untuk menyesuaikan strategi dengan kondisi sosial, budaya, dan politik yang berbeda di masyarakat. Oleh karena itu, keberhasilan implementasi kebijakan sangat bergantung pada perencanaan strategi yang matang, yang tidak hanya menetapkan arah perubahan, tetapi juga mampu mengakomodasi berbagai pandangan, kepentingan, dan dinamika masyarakat agar tujuan kebijakan dapat tercapai secara efektif dan berkelanjutan.

Stunting merupakan masalah kurang gizi kronis yang terjadi akibat asupan gizi yang tidak memadai dalam jangka waktu yang cukup lama, sehingga berdampak pada pertumbuhan dan perkembangan anak di masa depan. Kondisi ini menyebabkan anak mengalami kesulitan dalam mencapai perkembangan fisik dan kognitif secara optimal. Selain itu, anak yang mengalami stunting cenderung memiliki tingkat kecerdasan atau Intelligence Quotient (IQ) yang lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata IQ anak seusianya yang normal, sehingga stunting tidak hanya berdampak pada kesehatan fisik, tetapi juga pada kemampuan belajar dan potensi intelektual anak

(Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2018).

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu suatu metode kerja penelitian yang menekankan pengumpulan dan analisis data secara mendalam melalui uraian deskriptif yang disusun secara sistematis, mulai dari pengumpulan hingga penafsiran dan pelaporan hasil. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memahami proses yang terjadi di lapangan secara alamiah dan menyeluruh, dengan mengumpulkan informasi berupa pendapat, tanggapan, konsep, keterangan, maupun dokumen pendukung lainnya. Data yang diperoleh bersifat deskriptif, mencakup gejala, catatan lapangan, dokumen, atau bukti visual lainnya, sehingga memungkinkan peneliti menangkap fenomena secara utuh dan kontekstual. Dengan demikian, pendekatan kualitatif memberikan ruang bagi peneliti untuk menghasilkan informasi yang mendalam dan berkualitas tinggi mengenai permasalahan yang sedang dikaji, sekaligus menafsirkan dinamika dan interaksi yang terjadi di lapangan secara komprehensif.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif dengan tujuan memberikan gambaran menyeluruh dan sistematis mengenai implementasi Aplikasi Elektronik Siap Nikah Siap Hamil (Elsimil) di Balai Penyuluhan Keluarga Berencana Kecamatan Babirik, Kabupaten Hulu Sungai Utara. Pendekatan ini memungkinkan peneliti meneliti kondisi objek secara alamiah, dengan manusia sebagai instrumen utama, serta menyajikan data dalam bentuk kata-kata atau pernyataan yang merepresentasikan kondisi sebenarnya. Data dikumpulkan secara beragam dan dianalisis secara induktif untuk memahami makna dan konteks, sehingga informasi yang diperoleh dapat menggambarkan implementasi aplikasi secara realistis dan kontekstual.

Lokasi penelitian merujuk pada tempat atau wilayah di mana seluruh kegiatan penelitian akan dilaksanakan, sehingga memberikan konteks yang jelas mengenai objek dan lingkungan penelitian. Dalam studi ini, penulis menetapkan Balai Penyuluhan Keluarga Berencana Kecamatan Babirik sebagai lokasi penelitian karena tempat ini merupakan pusat kegiatan implementasi program Elsimil di wilayah tersebut. Balai ini terletak di Desa Babirik Hilir, Kecamatan Babirik, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan, dengan kode pos 71454, dan menjadi titik fokus pengumpulan data, observasi, serta interaksi langsung dengan petugas dan pengguna program, sehingga memungkinkan penelitian dilakukan secara komprehensif dan kontekstual.

Data yang digunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer merupakan informasi yang dikumpulkan langsung oleh peneliti dari sumbernya melalui wawancara dengan informan yang kompeten, sehingga data ini dianggap lebih akurat dan disajikan secara rinci. Sementara itu, data sekunder adalah data yang telah tersedia dalam berbagai bentuk, baik berupa statistik, laporan, atau dokumen historis yang disusun dan dipublikasikan maupun yang tersimpan dalam arsip. Data sekunder biasanya diperoleh dari instansi pemerintah, lembaga swasta, perusahaan, atau pihak terkait lainnya, dan dalam penelitian ini digunakan untuk mendukung dan melengkapi data primer agar analisis dapat dilakukan secara lebih komprehensif.

Sumber data dalam penelitian ini berasal dari informan, yaitu orang-orang yang digunakan untuk memberikan informasi mengenai situasi dan kondisi yang menjadi latar belakang penelitian, serta benar-benar memahami permasalahan yang sedang diteliti. Pemilihan informan dilakukan dengan teknik purposive sampling, yaitu pengambilan sampel berdasarkan pertimbangan tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian. Dengan cara ini, peneliti memilih sebagian atau keseluruhan populasi yang dianggap mampu memberikan informasi yang akurat dan representatif, sehingga data

yang diperoleh dapat dipercaya dan mendukung analisis penelitian secara valid.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk memperoleh data primer yang akurat. Observasi dilakukan dengan mengamati fenomena secara sistematis, wawancara dilakukan tatap muka dengan informan yang memahami permasalahan, dan dokumentasi memanfaatkan catatan, dokumen, atau bukti lain yang relevan. Setelah data terkumpul, dilakukan analisis melalui reduksi data untuk menyederhanakan informasi, penyajian data agar pola dan hubungan terlihat, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi untuk memastikan hasil penelitian valid dan kredibel.

PEMBAHASAN

A. Implementasi Penggunaan Aplikasi Elsimil (Elektronik Siap Nikah Siap Hamil) di Kecamatan Babirik Kabupaten Hulu Sungai Utara

Secara umum, implementasi berarti pelaksanaan atau penerapan suatu kebijakan, program, atau kegiatan dengan tujuan mencapai hasil tertentu yang telah ditetapkan. Istilah ini sering dikaitkan dengan proses mewujudkan rencana atau konsep ke dalam praktik nyata di lapangan, sehingga kebijakan atau program tidak hanya menjadi teori. Implementasi juga mencakup upaya pengorganisasian, koordinasi, dan pengelolaan sumber daya agar setiap langkah dapat dijalankan sesuai dengan tujuan yang diinginkan, sehingga hasil yang diharapkan dapat tercapai secara efektif dan berkelanjutan.

1. Komunikasi

Komunikasi merupakan faktor penting dalam pelaksanaan kebijakan atau program, karena setiap kebijakan akan lebih efektif jika terjadi komunikasi yang baik antara pelaksana program dan kelompok sasaran. Melalui komunikasi yang jelas, tujuan dan sasaran program dapat disampaikan dengan tepat, sehingga tingkat pemahaman kelompok sasaran meningkat dan potensi penolakan atau kesalahan dalam penerapan program dapat diminimalkan. Selain itu, komunikasi yang efektif juga membantu para pembuat keputusan dan pelaksana kebijakan untuk tetap konsisten dan selaras dalam menjalankan setiap langkah kebijakan, sehingga program dapat diimplementasikan secara optimal dan sesuai dengan konteks masyarakat.

a. Sosialisasi

Sosialisasi yang efektif menjadi kunci tercapainya implementasi yang baik, karena penyampaian informasi yang jelas dan tepat kepada kelompok sasaran akan mempermudah penerapan program atau kebijakan. Namun, seringkali terjadi kendala dalam proses sosialisasi, terutama terkait kurangnya pemahaman di tingkat masyarakat, yang biasanya disebabkan oleh berlapisnya prosedur birokrasi sehingga pesan atau tujuan awal dari program dapat terdistorsi sebelum sampai ke sasaran. Oleh karena itu, sosialisasi yang terstruktur dan langsung sangat diperlukan agar implementasi kebijakan dapat berjalan sesuai dengan rencana dan memberikan hasil yang optimal.

Berdasarkan wawancara, observasi, dan dokumentasi, sosialisasi mengenai penggunaan Aplikasi Elsimil di Kecamatan Babirik masih kurang efektif. Kegiatan sosialisasi jarang dilakukan secara rutin dan biasanya hanya saat ada calon pengantin, sehingga masyarakat umum kurang memahami tujuan dan manfaat aplikasi, terutama dalam pencegahan stunting. Informasi lebih fokus pada pengisian data daripada edukasi, dan sosialisasi sebagian besar hanya diberikan kepada Tim Pendamping Keluarga,

sehingga pemahaman masyarakat tetap rendah dan penyebaran informasi tidak merata.

b. Kejelasan

Komunikasi yang efektif adalah komunikasi yang disampaikan secara jelas dan mudah dipahami oleh penerima, sehingga mengurangi risiko kesalahpahaman. Kesalahan dalam menangkap informasi dapat menyebabkan tujuan komunikasi tidak tercapai dan pesan yang disampaikan tidak sesuai dengan maksud serta makna yang diharapkan.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, kejelasan informasi mengenai penggunaan Aplikasi Elsimil di Kecamatan Babirik dinilai sudah baik. Tim Pendamping Keluarga dan penyuluh KB memberikan penjelasan mengenai data yang harus diisi dan cara penggunaan aplikasi, serta mendampingi calon pengantin secara langsung selama proses pengisian kuesioner. Pendekatan ini dilakukan secara personal melalui kunjungan rumah maupun bimbingan di kantor KB, sehingga calon pengantin dapat memahami tahapan penggunaan aplikasi dengan jelas, proses pengisian data menjadi lebih terarah, dan kesalahan penginputan dapat diminimalkan. Dengan cara ini, sosialisasi yang sistematis dan jelas membantu implementasi program berjalan efektif dan pemahaman masyarakat menjadi lebih merata.

2. Sumber Daya

Implementasi suatu program juga dapat dilihat dari sejauh mana sumber daya yang digunakan berfungsi untuk menjaga kelancaran dan keberlangsungan kegiatan. Selain itu, efektivitas implementasi dapat dinilai dari kemampuan sumber daya organisasi dalam menjalankan program yang berkaitan dengan masyarakat. Variabel sumber daya ini kemudian dianalisis melalui beberapa indikator berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh.

a. Kemampuan dan Jumlah

Kemampuan pelaksana kebijakan memegang peran penting dalam kesuksesan implementasi program. Pelaksana yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang baik akan lebih mampu menjalankan kebijakan secara efektif dan memastikan tujuan program tercapai.

Berdasarkan wawancara, observasi, dan dokumentasi, jumlah TPK di Kecamatan Babirik sudah mencukupi, tetapi kemampuan teknis mereka dalam mengoperasikan aplikasi Elsimil dan membimbing masyarakat masih terbatas. Pelatihan jarang dilakukan dan tidak diikuti seluruh anggota, sehingga pendampingan belum optimal. Hal ini menunjukkan bahwa selain jumlah, peningkatan kemampuan TPK sangat diperlukan agar implementasi aplikasi berjalan efektif dan tujuan program tercapai.

b. Fasilitas

Fasilitas fisik merupakan salah satu faktor kunci dalam keberhasilan implementasi suatu kebijakan. Meskipun staf yang tersedia mencukupi dan memiliki wewenang untuk menjalankan tugasnya, tanpa dukungan fasilitas yang memadai, proses pelaksanaan kebijakan tidak akan berjalan optimal. Fasilitas yang lengkap dan memadai akan mempermudah pelaksana dalam melaksanakan tugas, mendukung koordinasi, dan memastikan setiap langkah program dapat dijalankan secara efektif, sehingga tujuan kebijakan dapat tercapai sesuai rencana.

Berdasarkan wawancara dan observasi, fasilitas pendukung penggunaan

aplikasi Elsimil di Kecamatan Babirik masih kurang memadai. Seluruh proses pendataan mengandalkan handphone pribadi petugas, sehingga jika terjadi kendala, petugas terpaksa meminjam handphone calon pengantin untuk melanjutkan penginputan data. Dukungan berupa uang internet terbatas hanya digunakan untuk paket data, dan tidak tersedianya handphone operasional membuat proses input sering terganggu akibat error atau kapasitas yang kurang. Kondisi ini memaksa petugas melakukan strategi alternatif, seperti mendokumentasikan data terlebih dahulu sebelum menginput kembali saat jaringan stabil. Hal tersebut menunjukkan bahwa keterbatasan fasilitas menjadi kendala signifikan dalam pelaksanaan aplikasi, sehingga proses pendataan belum berjalan optimal dan perlu diperbaiki agar implementasi program dapat lebih efektif.

3. Disposisi

Disposisi merujuk pada karakteristik yang melekat pada pelaksana kebijakan atau program. Karakter penting yang harus dimiliki antara lain kejujuran, komitmen, dan sikap demokratis. Pelaksana yang jujur dan berkomitmen akan mampu bertahan menghadapi berbagai hambatan, menjalankan program sesuai pedoman, dan melaksanakan setiap tahap secara konsisten. Sementara sikap demokratis membantu menciptakan kesan positif di mata kelompok sasaran, mengurangi resistensi, dan menumbuhkan rasa percaya serta kepedulian masyarakat terhadap pelaksana dan program yang dijalankan. Dengan disposisi yang baik, pelaksana tidak hanya memahami apa yang harus dilakukan, tetapi juga memiliki kemampuan untuk melaksanakan kebijakan secara efektif.

a. Sikap Para Pelaksana

Pengangkatan birokrat serta disposisi atau sikap para pelaksana dapat menjadi sumber hambatan nyata dalam implementasi kebijakan jika ada personel yang tidak menjalankan kebijakan sesuai arahan pejabat atau tujuan yang telah ditetapkan. Sikap atau ketidakpatuhan sebagian pelaksana ini dapat mengganggu kelancaran program, menimbulkan ketidaksesuaian antara rencana dan pelaksanaan, serta mengurangi efektivitas kebijakan yang diterapkan. Oleh karena itu, pemilihan personel yang tepat dan pembinaan disposisi pelaksana menjadi sangat penting agar implementasi kebijakan dapat berjalan lancar dan sesuai dengan tujuan yang diinginkan.

Berdasarkan wawancara, observasi, dan dokumentasi, sikap pelaksana dalam penggunaan Aplikasi Elsimil di Kecamatan Babirik sudah baik. Tim Pendamping Keluarga menunjukkan tanggung jawab dan kepedulian dengan mendampingi calon pengantin serta ibu hamil dan balita, menjelaskan tujuan dan manfaat aplikasi, serta mengambil inisiatif tanpa menunggu laporan menumpuk. Sikap pelaksana yang baik ini menjadi faktor penting bagi keberhasilan implementasi, karena ketidakpatuhan atau sikap kurang tepat dapat menimbulkan hambatan nyata dalam pelaksanaan kebijakan.

b. Insentif

Insentif menjadi faktor penting dalam mendukung pelaksanaan suatu program karena dapat meningkatkan motivasi, kinerja, dan tanggung jawab pelaksana di lapangan. Pemberian insentif yang sesuai dengan beban tugas membuat pelaksana merasa dihargai dan mendorong program berjalan lebih efektif dan efisien, sedangkan insentif yang tidak memadai dapat menurunkan efektivitas pelaksanaan program.

Berdasarkan wawancara dan observasi, insentif bagi pelaksana aplikasi Elsimil di Kecamatan Babirik sudah memadai. Bentuk insentif yang diterima meliputi gaji dan dukungan anggaran untuk kuota internet yang digunakan dalam proses pendampingan

dan pengisian data. Insentif tersebut dinilai cukup membantu kelancaran pelaksanaan tugas di lapangan, terutama dalam menunjang kegiatan pendampingan, sehingga pelaksana merasa dihargai dan program dapat berjalan lebih efektif dan efisien.

4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi memegang peran penting dalam implementasi kebijakan, mencakup mekanisme pelaksanaan dan susunan organisasi pelaksana. Mekanisme biasanya diatur melalui standar operasional prosedur (SOP) yang jelas, sistematis, mudah dipahami, dan menjadi panduan bagi pelaksana dalam menjalankan tugas. Sementara itu, struktur organisasi pelaksana dirancang sesederhana mungkin untuk menghindari prosedur yang rumit dan panjang, sekaligus menjamin proses pengambilan keputusan berjalan efektif.

a. SOP (Standar Operasional Prosedur)

SOP dapat menjadi kendala dalam implementasi kebijakan baru yang memerlukan metode kerja atau jenis personel berbeda dari kebiasaan organisasi. Semakin besar perubahan yang dibutuhkan oleh suatu kebijakan, semakin besar pula kemungkinan SOP menghambat pelaksanaan program.

Berdasarkan wawancara dan observasi, pelaksanaan aplikasi Elsimil di Kecamatan Babirik telah mengikuti alur dan prosedur standar (SOP) dengan baik. Calon pengantin melakukan pemeriksaan kesehatan di Puskesmas, kemudian mengisi aplikasi secara mandiri atau dibantu Tim Pendamping Keluarga (TPK), dan setelah selesai diterbitkan sertifikat Elsimil sebagai syarat administrasi pernikahan di KUA. Pelaksanaan ini juga didukung koordinasi yang baik antara Puskesmas, Kantor KB, dan KUA, serta pendampingan langsung oleh TPK. Dengan demikian, SOP yang diterapkan berjalan efektif, meskipun secara teori semakin besar perubahan yang dibutuhkan oleh kebijakan, semakin tinggi kemungkinan SOP menjadi penghambat implementasi.

b. Fragmentasi (Pembagian Tanggung Jawab)

Fragmentasi adalah pembagian tanggung jawab pelaksanaan kegiatan atau aktivitas pegawai di antara beberapa unit kerja, sehingga setiap tugas dapat tersebar secara terstruktur dan tidak menumpuk pada satu pihak. Dengan adanya fragmentasi, koordinasi antar unit kerja menjadi lebih jelas, pembagian peran lebih efektif, dan pelaksanaan program dapat berjalan lebih teratur serta terkontrol.

Berdasarkan wawancara dan observasi, pembagian tugas atau fragmentasi dalam pelaksanaan aplikasi Elsimil sudah berjalan dengan baik. Setiap anggota tim, mulai dari kader TPK, pihak Puskesmas, hingga pelaksana terkait lainnya, menjalankan tanggung jawab masing-masing sesuai fungsi mereka. Kondisi ini membuat proses pendataan dan pendampingan calon pengantin melalui aplikasi Elsimil berjalan lancar dan terstruktur, sesuai dengan prinsip fragmentasi yang menekankan penyebaran tanggung jawab kegiatan di antara beberapa unit kerja.

B. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Penggunaan Aplikasi Elsimil (Elektronik Siap Nikah Siap Hamil) di Kecamatan Babirik Kabupaten Hulu Sungai Utara

1. Faktor Pendukung

a. Kerja sama antar Organisasi berjalan Baik Dalam Pelaksanaan Aplikasi Elsimil (Elektronik Siap Nikah Siap Hamil)

Berdasarkan wawancara dan observasi, kerjasama antar organisasi dalam pelaksanaan aplikasi Elsimil sudah berjalan dengan baik. Berbagai pihak, seperti

Puskesmas, Penyuluh KB, Tim Pendamping Keluarga, pemerintah desa, dan masyarakat, berkoordinasi secara efektif sesuai tugas dan fungsinya masing-masing. Pembagian tanggung jawab yang jelas antar pelaksana membuat proses penggunaan aplikasi Elsimil berjalan lancar dan terstruktur, selaras dengan prinsip fragmentasi yang menekankan penyebaran tanggung jawab di antara beberapa unit kerja.

2. Faktor Penghambat

a. Keterbatasan Anggaran dalam Pelaksanaan Sosialisasi Aplikasi Elsimil (Elektronik Siap Nikah Siap Hamil)

Berdasarkan wawancara, observasi, dan dokumentasi, penyampaian komunikasi melalui sosialisasi mengenai penggunaan aplikasi Elsimil di Kecamatan Babirik masih kurang efektif. Sosialisasi hanya dilakukan saat ada calon pengantin, sehingga edukasi mengenai manfaat dan tujuan aplikasi tidak merata dan cenderung terbatas pada pemenuhan administrasi. Pelaksanaan yang tidak rutin ini membuat pemahaman masyarakat terhadap aplikasi masih rendah, sehingga implementasi program belum optimal, berbeda dengan teori yang menyatakan bahwa sosialisasi komunikasi yang baik akan mendukung pelaksanaan kebijakan secara efektif.

b. Kurangnya Pelatihan Tim Pendamping Keluarga dalam Pelaksanaan Aplikasi Elsimil (Elektronik Siap Nikah Siap Hamil)

Berdasarkan wawancara dan observasi, faktor penghambat implementasi aplikasi Elsimil di Kecamatan Babirik terlihat dari kurangnya pelatihan bagi Tim Pendamping Keluarga (TPK). Pembaruan aplikasi setiap tahun tidak diimbangi dengan peningkatan kompetensi pelaksana, sehingga sebagian TPK belum optimal dalam menggunakan fitur aplikasi. Kondisi ini mengakibatkan proses penginputan data tidak berjalan lancar dan implementasi program belum maksimal, menunjukkan bahwa jumlah personel yang memadai harus didukung kemampuan yang cukup agar pelaksanaan program efektif dan tujuan tercapai.

c. Aplikasi yang sering tidak bisa diakses

Berdasarkan wawancara dan observasi, fasilitas pendukung dalam pelaksanaan aplikasi Elsimil di Kecamatan Babirik masih kurang memadai. Seluruh proses pendataan mengandalkan handphone pribadi petugas, dan jika terjadi kendala, petugas terpaksa meminjam handphone calon pengantin. Tidak tersedianya handphone operasional khusus maupun kapasitas penyimpanan yang memadai sering menimbulkan gangguan saat penginputan data, sehingga proses pendataan tidak berjalan optimal. Kondisi ini menunjukkan bahwa sarana prasarana memadai merupakan faktor penting untuk keberhasilan implementasi kebijakan.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, implementasi penggunaan Aplikasi Elsimil (Elektronik Siap Nikah Siap Hamil) di Kecamatan Babirik, Kabupaten Hulu Sungai Utara, dapat dikategorikan cukup baik meskipun masih terdapat beberapa kendala yang mempengaruhi efektivitas program. Pada subvariabel komunikasi, indikator sosialisasi masih menunjukkan kelemahan karena kegiatan sosialisasi belum dilaksanakan secara rutin dan hanya difokuskan pada calon pengantin, sehingga pemahaman masyarakat terkait manfaat aplikasi belum tersebar merata. Meski demikian, indikator kejelasan informasi menunjukkan hasil yang positif, karena penyuluh KB dan Tim Pendamping Keluarga (TPK) mampu menyampaikan informasi secara jelas mengenai data

yang harus diisi, tata cara penggunaan aplikasi, dan memberikan pendampingan langsung kepada calon pengantin. Pendekatan ini dilakukan melalui kunjungan rumah maupun bimbingan di kantor KB, sehingga membantu calon pengantin memahami tahapan penggunaan aplikasi dan meminimalkan kesalahan input data. Hal ini menegaskan bahwa komunikasi yang efektif, baik dari segi kejelasan maupun keterlibatan langsung pelaksana, tetap menjadi faktor penting dalam keberhasilan implementasi program, meskipun sosialisasi yang lebih merata perlu ditingkatkan.

Pada subvariabel sumber daya dan disposisi, terdapat kombinasi hasil yang positif dan masih perlu perbaikan. Kemampuan teknis dan jumlah TPK menunjukkan keterbatasan karena pelatihan penggunaan aplikasi jarang dilakukan, sementara aplikasi selalu diperbarui setiap tahun, sehingga sebagian pelaksana belum sepenuhnya menguasai fitur baru dalam aplikasi. Selain itu, fasilitas pendukung seperti handphone operasional khusus maupun kapasitas penyimpanan yang memadai masih terbatas, sehingga proses penginputan data sering terganggu dan terkendala teknis. Di sisi lain, sikap para pelaksana menunjukkan hasil yang baik karena TPK memiliki tanggung jawab tinggi, peduli terhadap masyarakat, dan secara aktif melakukan pendampingan langsung. Insentif berupa gaji dan dukungan kuota internet turut membantu kelancaran pelaksanaan tugas di lapangan, meningkatkan motivasi, kinerja, dan rasa tanggung jawab pelaksana, sehingga meskipun terdapat keterbatasan sumber daya dan fasilitas, kegiatan pendampingan tetap dapat berjalan dengan cukup lancar.

Pada subvariabel struktur birokrasi dan faktor pendukung maupun penghambat, penelitian menunjukkan hasil yang beragam namun tetap menunjang implementasi. SOP pelaksanaan aplikasi Elsimil telah diterapkan dengan baik, terlihat dari alur kerja yang jelas mulai dari pemeriksaan kesehatan calon pengantin hingga penerbitan sertifikat sebagai syarat administrasi pernikahan. Pembagian tugas atau fragmentasi antar instansi maupun pelaksana juga sudah berjalan efektif sesuai fungsi masing-masing. Faktor pendukung utama adalah kerja sama antar organisasi, termasuk koordinasi antara Puskesmas, penyuluh KB, TPK, pemerintah desa, dan masyarakat, yang memungkinkan pelaksanaan program lebih terstruktur dan terkontrol. Di sisi lain, faktor penghambat masih menjadi tantangan signifikan, meliputi keterbatasan anggaran untuk sosialisasi, kurangnya pelatihan bagi TPK, dan masalah teknis pada aplikasi yang kadang tidak dapat diakses, sehingga pemahaman masyarakat terkait aplikasi Elsimil belum merata dan implementasi program belum sepenuhnya optimal. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi tidak hanya ditentukan oleh jumlah pelaksana, tetapi juga oleh kemampuan, fasilitas, koordinasi, serta dukungan sistem yang memadai.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim (2012) *Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan*. Jakarta: Departemen Kesehatan RI.
- Anonim (2021) *Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting*. Jakarta.
- Gunawan, I. (2014) *Metode Penelitian Kualitatif (Teori dan Praktik)*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Harbani Pasalong (2016) *Metode Penelitian Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta, CV.
- Ibrahim (2015) *Metodologi Penelitian Kualitatif (Panduan Penelitian Beserta Contoh Proposal Penelitian Kualitatif)*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Indiahono, D. (2017) *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis*. Yogyakarta: Gava Media.



- Putri, D.A.S. (2023) *Implementasi Aplikasi Elektronik Siap Nikah Siap Hamil (ELSIMIL) oleh BKKBN dalam Rangka Penurunan Stunting di Kota Yogyakarta.*
- Sahaya, A. (2015) *Metode Penelitian Administrasi.* Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Sinta, N. (2022) *Implementasi Kebijakan Pencegahan Stunting oleh Desa Sagulung Kecamatan Baregbeg Kabupaten Ciamis.*
- Sugiyono (2017) *Metode Penelitian Kebijakan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, R & D dan Penelitian Evaluasi).* Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono (2019) *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D.* Bandung: Alfabeta.